

## **BAB 5**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

##### **5.1.1 Gambaran Umum Setting Penelitian**

Bapenda adalah salah satu instansi di bawah pemerintah daerah yang memiliki fungsi serta tugas dalam mengelola pendapatan masing-masing daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundangan daerah atau Perda. Bapenda bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah. Tugas Bapenda mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengordinasi instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah mendukung peran dan rasionalitas pengawasan pemerintah pusat dalam evaluasi raperda dan perda PDRB serta sinergitas data dan informasi PDRD. Kajian proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB-PBBKB-PAP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2028 ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; menganalisis aspek pengembangan organisasi dalam tataran:

1. aspek sumber daya strategik pajak dan retribusi daerah,
2. aspek struktur organisasi serta administratif pajak dan retribusi daerah,
3. aspek komunikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dan
4. aspek disposisi atau sikap para pelaksana dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; serta menganalisis realisasi dan potensi prakiraan penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam PKB, BBNKB I- BBNKB II, PBBKB dan PAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pembangunan, dalam tahun 2023 berupaya untuk melanjutkan upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Melalui upaya menetapkan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah tahun 2023-2028. Melalui diskresi dalam manajemen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan pajak air permukaan (PAP). Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (PKB-BBNKB-PPBKB-PAP) merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu

upaya penguatan keuangan daerah ke dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ditetapkan pada 16 Juni 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Fungsi Dispenda atau Bapenda secara khusus diatur oleh masing-masing daerah. Namun fungsi Bapenda secara umum di antaranya:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.
9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.

12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor.

Jenis-jenis pajak Bapenda atau pajak yang dikelola oleh Dispenda sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (diubah/dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022). Jenis pajak provinsi yang dikelola Bapenda

#### 1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

#### 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

#### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

#### 4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

## 5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok dipungut pemerintah.



### 5.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Hasil Uji Validitas Angket

Uji validitas angket penelitian ini mengikuti kriteria  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel item angket valid. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, item angket tidak valid. Hasil uji validitas angket penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Angket Fungsi Anggaran

Tabel 5.1 Validitas Angket Fungsi Anggaran

No.	Item	$r$ hitung	$r$ tabel dengan jumlah $n=25$	Perbandingan	Keterangan
1.	X1.1.	0,744	0,396	$0,744 > 0,396$	Valid
2.	X1.2.	0,622	0,396	$0,622 > 0,396$	Valid
3.	X1.3.	0,816	0,396	$0,816 > 0,396$	Valid
4.	X1.4.	0,669	0,396	$0,669 > 0,396$	Valid
5.	X1.5.	0,632	0,396	$0,632 > 0,396$	Valid
6.	X1.6.	0,664	0,396	$0,664 > 0,396$	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket fungsi anggaran penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung item 1 sampai 6  $>$   $r$  tabel 0,396 ( $n=25$ ). Dengan demikian semua item angket penelitian ini valid dan dapat digunakan mengumpulkan data fungsi anggaran.

## 2) Angket Fungsi Pengawasan

Tabel 5.2 Validitas Angket Fungsi Pengawasan

No.	Item	$r$ hitung	$r$ tabel dengan jumlah $n=25$	Perbandingan	Keterangan
1.	X2.1.	0,729	0,396	$0,729 > 0,396$	Valid
2.	X2.2.	0,504	0,396	$0,504 > 0,396$	Valid
3.	X2.3.	0,489	0,396	$0,489 > 0,396$	Valid
4.	X2.4.	0,507	0,396	$0,507 > 0,396$	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket fungsi pengawasan penelitian ini menunjukkan bahwa  $r$  hitung item 1 sampai 4  $>$   $r$  tabel 0,396 ( $n=25$ ). Semua item pada angket fungsi pengawasan penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data fungsi pengawasan.

## 3) Angket Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 5.3 Validitas Angket Kinerja Keuangan Daerah

No.	Item	$r$ hitung	$r$ tabel dengan jumlah $n=25$	Perbandingan	Keterangan
1.	Y1	0,650	0,396	$0,650 > 0,396$	Valid
2.	Y2	0,688	0,396	$0,688 > 0,396$	Valid
3.	Y3	0,516	0,396	$0,516 > 0,396$	Valid
4.	Y4	0,543	0,396	$0,543 > 0,396$	Valid
5.	Y5	0,718	0,396	$0,718 > 0,396$	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket kinerja keuangan penelitian ini menunjukkan bahwa  $r$  hitung item 1 sampai 5  $>$   $r$  tabel 0,396 ( $n=25$ ). Semua item pada angket kinerja keuangan penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas angket ditentukan nilai Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha  $>$  0,6 angket penelitian reliabel dan dapat digunakan mengumpulkan data penelitian.

Tabel 5.4

Hasil Uji Reliabilitas Angket

No.	Angket Penelitian	Cronbach's Alpha	Perbandingan	Keterangan
1.	Fungsi Anggaran	0,874	$>0,6$	Reliabel
2.	Fungsi Pengawasan	0,736	$>0,6$	Reliabel
3.	Kinerja Keuangan	0,815	$>0,6$	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji reliabilitas angket penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha semua angket  $>0,6$ . Nilai Cronbach's Alpha angket fungsi anggaran  $0,874 > 0,6$ . Nilai Cronbach's Alpha angket fungsi pengawasan  $0,736 > 0,6$ . Nilai Cronbach's Alpha angket kinerja keuangan daerah  $0,815 > 0,6$ . Semua angket penelitian ini memenuhi kriteria reliabel angket penelitian.

### 5.1.3 Hasil Analisis Deskripsi

Hasil jawaban responden pada angket penelitian ini mendeskripsikan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan kinerja keuangan daerah. Berikut ini

diuraikan deskripsi fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan kinerja keuangan daerah.

### 1. Fungsi Anggaran

Tabel 5.5 Deskripsi Fungsi Anggaran

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Anggaran disusun sesuai pedoman	-	-	-	-	16	45,7	2	5,7	17	48,6
2.	Anggaran disusun sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
3.	Sasaran anggaran jelas	-	-	-	-	6	17,1	9	25,7	20	57,1
4.	Sasaran anggaran terarah	-	-	-	-	1	2,9	14	40	20	57,1
5.	Target anggaran sesuai tujuan	-	-	-	-	1	2,9	11	31,4	23	65,7
6.	Target anggaran memungkinkan untuk dicapai (realistis)	-	-	-	-	3	8,6	12	34,3	20	57,1

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Keterangan:

STS= Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-ragu

S = Sangat Setuju

SS = Sangat Setuju

Tabel deskripsi fungsi anggaran di atas menunjukkan tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju anggaran disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-

ragu 16 orang (70%) Responden menjawab setuju 2 orang (5,7%). Responden menjawab sangat setuju anggaran disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan 17 orang (48,6%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju anggaran disusun sesuai dengan aturan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab netral atau ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju anggaran disusun sesuai dengan aturan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan jelas. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 6 orang (17,1%) Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan jelas 20 orang (57,1%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan terarah. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 14 orang (40%). Responden menjawab sangat setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan terarah 20 orang (57,1%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju target yang disusun Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tujuan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 14 orang (40%). Responden menjawab sangat setuju target yang disusun Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tujuan 20 orang (57,1%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju target yang disusun Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan memungkinkan untuk dicapai (relistis). Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 3 orang (8,6%) Responden menjawab setuju 12 orang (34,3%). Responden menjawab sangat setuju target yang disusun Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan memungkinkan untuk dicapai (relistis) 20 orang (57,1%).

## 2. Fungsi Anggaran

Tabel 5.6 Deskripsi Fungsi Pengawasan

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pengawasan menggunakan standar anggaran yang baku	-	-	-	-	16	45,7	2	5,7	17	48,6
2.	Pengawasan dilakukan terjadwal dan kontinu	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
3.	Pengawasan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan hasil	-	-	-	-	6	17,1	9	25,7	20	57,1
4.	Pengawasan	-	-	-	-	1	2,9	14	40	20	57,1

dilakukan untuk koreksi perbaikan										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel deskripsi fungsi pengawasan, diketahui tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju pengawasan menggunakan standar anggaran yang baku. Responden tidak ada menjawab. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 16 orang (70%) Responden menjawab setuju 2 orang (5,7%). Responden menjawab sangat setuju pengawasan menggunakan standar anggaran yang baku 17 orang (48,6%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengawasan dilakukan terjadwal dan kontinu. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab netral atau ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju pengawasan dilakukan terjadwal dan kontinu 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengawasan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 6 orang (17,1%) Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju pengawasan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan hasil 20 orang (57,1%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengawasan dilakukan untuk koreksi perbaikan. Responden tidak ada menjawab tidak

setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 14 orang (40%). Responden menjawab sangat setuju pengawasan dilakukan untuk koreksi perbaikan 20 orang (57,1%).

### 3. Kinerja Keuangan

Tabel 5.7 Deskripsi Kinerja Keuangan

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pengelolaan anggaran untuk semua program	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
2.	Anggaran dikeluarkan sesuai sasaran yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
3.	Anggaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan	-	-	-	-	1	2,9	14	40	20	57,1
4.	Anggaran digunakan secara transparan	-	-	-	-	1	2,9	11	31,4	23	65,7
5.	Pengelolaan anggaran dilakukan secara adil dan merata.	-	-	-	-	3	8,6	12	34,3	20	57,1

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel deskripsi kinerja keuangan di atas, diketahui responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengelolaan anggaran untuk semua program. Rsponden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju pengelolaan anggaran untuk semua program 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengelolaan anggaran dikeluarkan sesuai sasaran. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju anggaran dikeluarkan sesuai sasaran 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengelolaan anggaran digunakan sesuai kebutuhan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 1 orang (2,9%). Responden menjawab setuju 14 orang (40%). Responden menjawab sangat setuju anggaran digunakan sesuai kebutuhan 20 orang (57,1%).

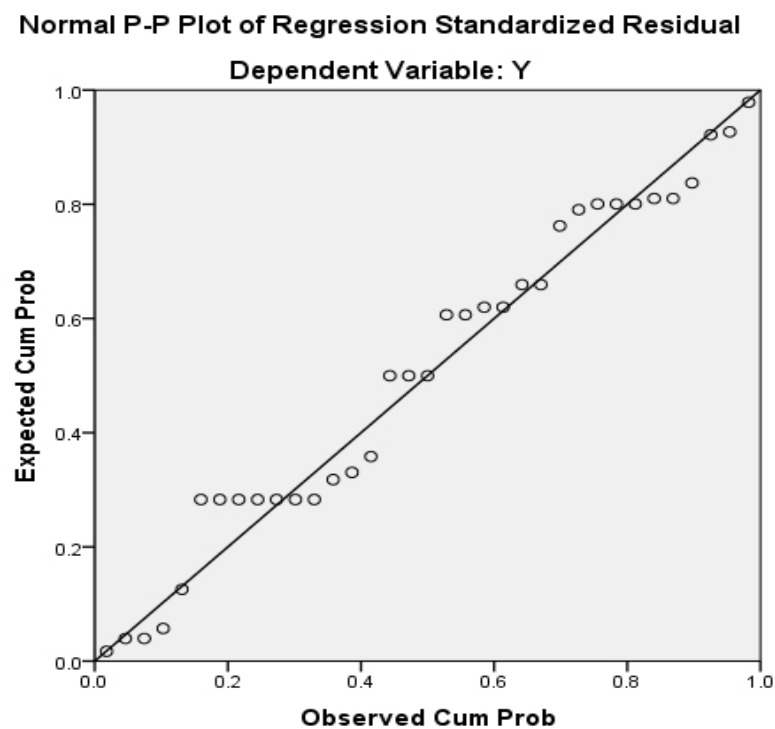
Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengelolaan anggaran digunakan secara transparan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 1 orang (2,9%). Responden menjawab setuju 11 orang (31,4%). Responden menjawab sangat setuju anggaran digunakan secara transparan 23 orang (65,7%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengelolaan anggaran dikelola dengan adil dan merata. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 3 orang (8,6%). Responden menjawab setuju 12 orang (34,3%). Responden menjawab sangat setuju anggaran dikelola dengan adil dan merata 20 orang (57,1%).

## 5. 1.4 Hasil Uji Asumsi

### a. Uji Normalitas Data

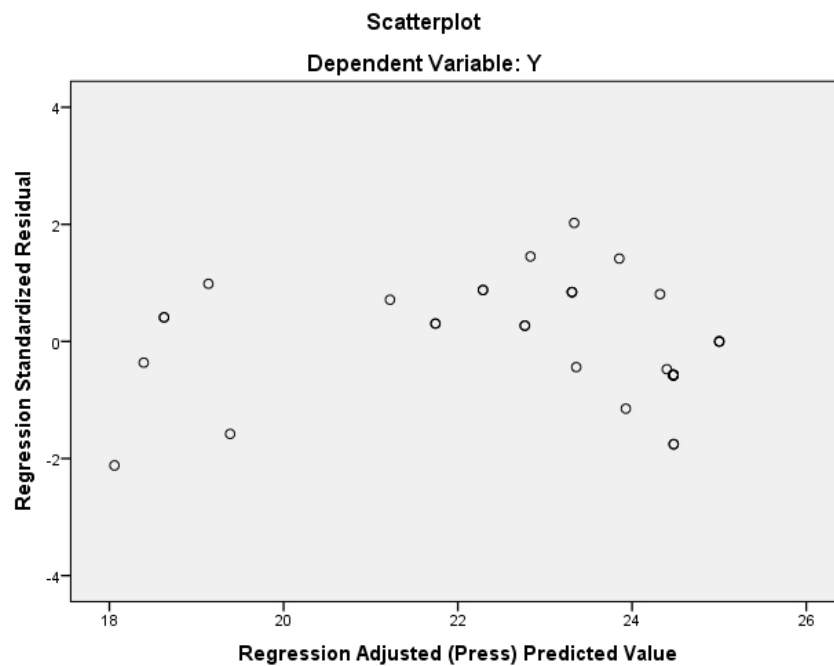
Normalitas data diuji dengan diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual* ini merupakan output analisis regresi. Ketentuannya adalah jika titik-titik pada diagram mengikuti garis lurus, maka data penelitian berdistribusi normal. Berikut ini diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual* hasil analisis regresi penelitian ini.



Hasil analisis regresi penelitian ini menunjukkan titik-titik mengikuti garis lurus pada diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Jadi data penelitian mengenai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berdistribusi normal

## b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas ditentukan dengan menggunakan diagram pancar. Salah satu output analisis regresi dengan SPSS menunjukkan diagram pancar yang berfungsi untuk menentukan apakah data penelitian mengalami gejala heterokedastisitas. Jika pada diagram pancar itu terdapat titik-titik yang tersebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka data penelitian tidak mengalami gejala heterokedastisitas.



Berdasarkan hasil analisis regresi penelitian ini terdapat diagram pancar yang menunjukkan titik-titik tersebar dan tidak membentuk suatu pola. Dengan demikian data fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

### c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditentukan dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF. Ketentuannya adalah jika tolerance  $>0,1$  dan VIF  $< 10$ , maka data penelitian tidak mengalami multikolinieritas. Hasil analisis regresi penelitian ini menunjukkan nilai tolerance dan VIF untuk semua variabel bebas.

Tabel 5.8 Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Fungsi Anggaran	0,326	3,070	tidak terjadi multikolinieritas
2.	Fungsi Pengawasan	0,326	3,070	tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Nilai tolerance fungsi anggaran sebesar  $0,236 > 0,1$  dan VIF  $3,070 < 10$ . Data fungsi anggaran penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Nilai tolerance fungsi pengawasan sebesar  $0,3,26 > 0,1$  dan VIF  $3,070 < 10$ . Data fungsi pengawasan penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Dengan demikian semua data penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

### 5.1.5 Hasil Analisis Regresi

Analisis regresi menunjukkan *output* tabel koefisien determinan, anova, dan koefisien regresi. Koefisien determinan dapat digunakan untuk menjelaskan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Anova digunakan untuk menentukan pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dan koefisien regresi menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 5.9 Koefisien Determinan

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,944 <sup>a</sup>	0,890	0,883	0,78019

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel koefisien determinan di atas dapat digunakan untuk memprediksi persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Nilai R pada tabel tersebut mencapai 0,944<sup>a</sup>. Nilai R dikuadratkan (R square) mencapai 0,890. Ini dapat dimaknai bahwa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 89%. Sisanya kinerja keuangan ini dipengaruhi variabel lain sebesar, 11,% (error)

Tabel 5.10 Koefisien Regresi

Model Penelitian	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-0,601	1,470		-0,409	0,685
X1	0,553	0,095	0,597	5,818	0,000
X2	0,475	0,125	0,390	3,802	0,001

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Koefisien regresi atau uji t dipakai untuk memprediksi pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara parsial. Kriterianya adalah jika signifikansi  $< 0,05$  maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial diterima. Pengaruh pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara parsial dalam penelitian ini diterima karena signifikansi yang dicapai  $< 0,05$ .

Hipotesis yang menyatakan Pengaruh pengaruh fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah pada bapenda Provinsi Kalimantan Selatan diterima karena nilai signifikansi hitung  $0,000 < 0,05$ . Hipotesis yang

menyebutkan pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Privinsi Kalimantan Selatan diterima karena nilai signifikansi hitungnya  $0,001 < 0,05$ .

Tabel 5.11 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	158,122	2	79,061	129,885	0,000 <sup>b</sup>
Residual	19,478	32	0,609		
Total	177,600	34			

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel *Analysis of variance* (Anova) output analisis regresi di atas dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara simultan. kriteria menentukan pengaruh itu dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel dan membandingkan signifikansi hitung dengan nilai signifikansi 0,05. Nilai F hitung  $>$  F tabel dengan signifikansi  $<$  0,05 membuktikan hipotesis yang menyebutkan bahwa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan simultan diterima.

Berdasarkan tabel anova di atas, diketahui bahwa F hitung 129,885 dan signifikansi 0,000. Nilaf F tabel di df 2 dan df 32 pada tabel F dengan taraf kepercayaan 0,5% sebesar 3,32. Jadi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara simultan diterima karena F hitung  $>$  F tabel dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hipotesis yang menyatakan Pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan di terima.

## **5.2 Pembahasan**

### **1. Pengaruh Fungsi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Temuan pertama penelitian ini adalah Fungsi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Pencapaian kinerja atau hasil kerja organisasi dengan baik memerlukan sebuah perencanaan atau rencana kerja yang, terarah, jelas, dan komprehensif sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Hasil kerja yang dicapai akan disajikan dalam bentuk anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target atau sasaran yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan dari sebuah organisasi periode satu tahun atau lebih dari satu tahun yang disusun dengan format tertentu.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Tambun, 2020). Penyusunan anggaran perusahaan atau suatu lembaga perlu diperhatikan beberapa syarat yaitu anggaran tersebut harus realistis, luwes, dan kontinyu. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Luwes, artinya harus disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Kontinyu, artinya diperhatikan secara terus menerus (Nurasik dan Nirwana, 2020).

Anggaran pada sektor publik berisi proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang

menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif atau tidak efisien dan tidak berorientasi pada hasil kerja maka bisa saja justru akan mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Hasil akhirnya tidak akan menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah-pemerintah daerah.

Anggaran memberikan beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi, antara lain perencanaan dan pengendalian, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, menyediakan informasi antar pekerja, sarana evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses penganggaran menyediakan kerangka kerja untuk anggaran diharapkan mendorong efektifitas pencapaian tujuan perusahaan (Mahardika dan Rokhayati, 2021).

## **2. Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Temuan kedua penelitian ini adalah Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya meminimalisir terjadinya sebuah permasalahan dalam penganggaran, penting dilakukan adanya pengawasan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap APBD yang telah direncanakan atau tidak. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik

tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Pengawasan merupakan suatu fungsi penting dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2007) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Sule dan Saefullah (2005 :318-319) menyatakan ada empat tujuan pengawasan yang meliputi 1) adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 2) Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi

dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. 3) Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan. 4) produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. 5) Meminimumkan biaya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan. 6) Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar Perusahaan atau lembaga dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks sehingga penyusunan anggaran dan penggunaannya terkontrol dengan baik. Anggaran yang dikontrol dengan baik akan mencapai kinerja keuangan yang maksimal.

Siswandi (2009 ) menegaskan bahwa tujuan pengawasan meliputi 1) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku. 2) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi. 3) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi 4) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi. 5) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja 6) aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.